

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan kepribadian manusia dapat dibina, ditingkatkan, harkat, derajat, martabat dan nilai kemanusiaannya untuk menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta budi pekerti, cerdas, kritis, terampil, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, cinta tanah air dan mampu menerapkan dalam kehidupannya.

Dalam hal ini dunia pendidikan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, yakni menghasilkan generasi penerus bangsa yang melek dan mampu berpikir kritis.

Pengembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan sumber daya yang sangat vital, untuk mengembangkan berpikir kritis siswa namun demikian dalam prosesnya guru tidak mudah dengan mampu mengimplementasikan pendidikan kearah pembinaan manusia seutuhnya. Mereka seyogyanya perlu memiliki keyakinan, pemikiran, prinsip, konsepsi landasan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Ini terbukti dengan adanya kenyataan lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak guru dalam proses pembelajaran tidak secara jelas adanya karakteristik keilmuan yang dikembangkan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Guru lebih berorientasi pada pemahaman

anak terhadap materi pelajaran tanpa mempertimbangkan pembentukan karakter anak sebagai efek hasil belajar, sehingga kurang mendorong terjadinya pengembangan anak yang dinamis dan budaya berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis memiliki konteks bebas, proses terbuka, dengan susunan teratur, sehingga memungkinkan siswa menyimak informasi dengan mudah dipahami.

Selaras dengan hal tersebut, maka pendidikan dalam hal ini dituntut untuk menciptakan manusia yang disiplin, produktif, dan kritis. Sebab kita membutuhkan manusia yang kritis dan bukan pintar menghafal, bukan manusia yang hapal sejarah, melainkan mengetahui sejarah itu untuk dijadikan landasan dalam menganalisis sesuatu.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 (ayat 1) disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Jika kita kaji, maka dalam undang-undang tersebut tersurat bahwasanya disamping membekali generasi bangsa yang kritis, pendidikan juga berkewajiban untuk membentuk warga negara yang demokratis. Namun kenyataan di lapangan berlawanan dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini nampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis seolah memberikan bukti bahwa iklim demokrasi belum tercipta secara penuh di negara kita.

Gerakan reformasi yang pada awalnya bertujuan menata kembali penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, seakan telah disalah artikan sehingga makna gerakannya tidak lagi sesuai lagi dengan makna reformasi itu sendiri (kebablasan). Ini terlihat dari maraknya gerakan masyarakat yang semakin brutal dalam menuntut hak-haknya berupa perusakan fasilitas umum, penjarahan dan penyanderaan. Cara-cara ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai budaya demokrasi yang mensyaratkan kedamaian. Seperti diungkapkan Mudji (2000 :45) bahwa :

“ Iklim budaya demokratis ditandai dengan adanya para warga yang hidup berdampingan secara damai, kreatif dan dapat menjalankan hak kontrol terhadap negaranya. Sehingga pembenahan tujuan reformasi harus segera dilakukan. Salah satu agenda reformasi yang akan dibangun bangsa Indonesia adalah menentang segala bentuk penyimpangan demokrasi seperti kediktatoran baik bersifat langsung maupun tidak langsung, feodalisme maupun totaliterisme sehingga tercipta suatu tatanan demokrasi yang sehat dan kuat”.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia saat ini disamping disebabkan oleh kurang dipahaminya konsep demokrasi juga diakibatkan berakarnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semasa Orde Lama dan Orde Baru. Dan hal ini pula yang menjadi faktor pendorong bergulirnya reformasi yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu target reformasi dalam hal ini adalah melakukan suatu perubahan atas dasar sistem dan landasan ideal yang ada dan memecahkan semua permasalahan tersebut. Krisis yang tak kunjung terselesaikan ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir untuk memecahkan berbagai persoalan tersebut. Karena orang yang memiliki

keterampilan berpikir kritis, akan mampu mencari alternatif penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Ia juga mampu mengevaluasi, membedakan dan menentukan apakah suatu informasi, buah pikiran orang lain ataupun pikirannya sendiri itu benar atau salah.

Sejalan dengan meningkatnya perubahan yang bersifat multidimensional baik, politik ekonomi maupun sosial budaya, tuntutan pemikiran kritis dan tindakan kreatif adalah mutlak diperlukan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Dalam Suplemen GBPP mata pelajaran PPKn tahun 1994 disebutkan bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai suatu mata pelajaran yang diajarkan di SMA sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dasar warga negara dalam hal ini siswa SMA, seperti berpikir kritis siswa dimana siswa diharapkan dapat terbiasa dalam mengambil keputusan, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya, beriman dan bertakwa sesuai dengan agamanya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keputusan bersama, mengemukakan pikiran secara lisan dan tertulis, berargumentasi, memimpin orang lain, berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini juga, maka PKn sebagai bagian integral dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan pada umumnya memiliki peran penting karena “mata pelajaran ini secara etimologis pada awalnya dikembangkan dalam tradisi Citizenship Education antara lain mengembangkan nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan negara hukum” (Suwama Al Muchtar, 2000:19).

Atas dasar permasalahan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah sangatlah penting, yakni untuk membekali siswa pengetahuan dasar nilai-nilai demokrasi sehingga dalam diri siswa tumbuh kesadaran berdemokrasi yang diperlukan guna menegakkan negara hukum. PKn dengan karakteristik konsepnya yang abstrak, kompleks dan simbolik, diharapkan dapat dijadikan wahana yang potensial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Mengingat perannya yang demikian strategis, maka diperlukan pembelajaran PKn yang berkualitas. Melalui pembelajaran ini guru dituntut untuk dapat membimbing siswa berpikir kritis dan menuntun mereka menghubungkan konsep yang diterimanya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini perlu dikembangkan mengingat dengan berpikir setiap individu akan mengalami perkembangan intelektual yang semakin matang. Namun kenyataan di lapangan saat ini menunjukkan hal sebaliknya, penguasaan kompetensi siswa pada pelajaran PKn masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini salah satunya tercermin dari rendahnya penguasaan kognitif siswa terhadap konsep-konsep PKn.

Data empirik rendahnya penguasaan konsep PKn siswa di Jawa Barat tahun 2002-2003 berkisar antara 6.8 mengindikasikan bahwa kondisi pembelajaran PKn saat ini masih memiliki kendala baik dalam mekanisme penyampaian materi kepada siswa maupun pada fokus keterampilan yang ditanamkan pendidik. Hasil studi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan pada beberapa Sekolah

Menengah Atas di Kabupaten Sumedang, dapat dinyatakan bahwa kondisi pembelajaran PKn di sekolah pada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran terfokus pada penguasaan konsep dan kurang merangsang atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan siswa dalam membangun pengetahuannya, karena guru senantiasa 'mendominasi' pembelajaran, akibatnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran terbatas.
2. Perolehan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PKn tahun 2002-2003 di Kabupaten Sumedang menunjukkan relatif masih rendah yakni dengan perolehan nilai tertinggi (ntt) 7,9 dan perolehan nilai terendah (ntr) 6,2 sehingga rata-rata (nr) 6,2.
3. Penilaian dalam PKn cenderung lebih menekankan pada materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja, sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotor) belum mendapat perhatian.
4. Pengelolaan kelas belum menciptakan pola pembelajaran yang kondusif untuk memberikan pengalaman langsung secara proaktif dan interaktif dilingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan kata suasana dan proses kehidupan sekolah umumnya dan di kelas khususnya sebagai laboratorium praktikum dan keteladanan target idiil pelajaran PKn belum terbina secara optimal.

Dari uraian di atas, maka sudah seharusnya pola pembelajaran dikembangkan dari pola pembelajaran yang didominasi guru yang kurang demokratis kearah pembelajaran yang lebih demokratis yaitu pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreatifitas berpikir kritis, aktual dan berinovasi. Perubahan pola pembelajaran yang mengembangkan seluas-luasnya kreatifitas pada siswa. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi, berimprovisasi, dan berapresiasi, karena pada dasarnya siswa mempunyai potensi yang harus dikembangkan oleh dirinya sendiri melalui pengalaman langsung dalam kegiatan-kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna.

Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas, ide, partisipasi (komitmen guru) untuk mengembangkan akses jaringan kerja yang lebih luas terhadap pengembangan berpikir kritis siswa. Pembelajaran demokrasi menuntut upaya sistematis dan sistemik untuk mengembangkan pola perilaku demokrasi sebagai warganegara, dalam menciptakan tatanan iklim yang demokratis, upaya ini amat strategis yang pada gilirannya kelak secara bersama-sama dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani Indonesia yang demokratis. Dan proses demokratis pada muaranya akan muncul siswa sebagai "Warganegara Indonesia muda" yang demokratis.

Dari pemikiran teoritik dan empirik seperti dipaparkan diatas, maka amat penting dan layak untuk dilakukan suatu studi agar memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran PKn yang demokrasi di sekolah untuk peningkatan dan perbaikan yang lebih spesifik terhadap peningkatan pembelajaran PKn di sekolah pada umumnya.



## Rumusan Dan Fokus Masalah Penelitian

### 1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi persoalan inti dan sekaligus menjadi fokus telaahan dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana dampak pembelajaran demokrasi terhadap berpikir kritis siswa pada siswa SMA Negeri 1 di Kabupaten Sumedang*"?

### 2. Fokus Masalah.

Berkenaan dengan pertanyaan tersebut diatas, perlu adanya penelitian untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi dalam pembelajaran demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya untuk mengamati apakah ada upaya guru untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, maka masalah pokok peningkatan berpikir kritis siswa tersebut dijabarkan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembelajaran demokratis.
  - a. Perencanaan pembelajaran bagaimana yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa?
  - b. Proses pembelajaran bagaimana yang dapat dikembangkan, dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa ?



- c. Pola Evaluasi pembelajaran bagaimana, yang dapat meningkatkan pemahaman berpikir kritis siswa serta mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor siswa?
  - d. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran demokratis yang dikembangkan?
  - e. Bagaimana keunggulan dan keterbatasan pembelajaran demokratis?
2. Berpikir kritis bagaimana yang dikembangkan siswa pada saat pembelajaran demokrasi berlangsung ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan pembelajaran demokratis dalam pembelajaran PKn sebagai upaya untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa .

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengkaji proses pembelajaran demokrasi dalam pembelajaran PKn di sekolah untuk mengembangkan berpikir kritis siswa.
- b. Mengetahui gambaran keterbatasan dan keunggulan dari pembelajaran demokrasi yang dikembangkan.
- c. Mengetahui gambaran siswa yang kritis terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah.



## D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

### 1. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperoleh data konseptual dan gambaran mengenai alternatif pembelajaran demokratis yang dapat dikembangkan guru dalam meningkatkan berpikir kritis siswa SMA.

### 2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sbb :

- a. Selain sebagai tugas akhir juga merupakan bahan pengembangan bagi peneliti
- b. Sebagai bahan masukan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang demokratis dalam rangka mengembangkan berpikir kritis siswa sebagai alternatif pengembangan kemampuan atau kompetensi siswa dalam berpikir kritis, sikap dan keterampilan sosial dan proses kegiatan belajar di sekolah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan jurusan PKn berbagai program di Perguruan Tinggi serta sebagai masukan pada Departemen Pendidikan Nasional dalam upaya peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

## E. Klarifikasi Konsep

Penulis berpandangan dan menafsirkan bahwa Pembelajaran demokrasi adalah sebagai berikut :

## 1. Pembelajaran Demokrasi

Dalam membina dan membelajarkan anak didik menjadi warganegara yang baik dan cerdas, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa nasionalisme / kebangsaan yang kuat dan mantap, sadar dan mampu membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat, bangsa dan negara, taat asas dan ketentuan, demokratis dan partisipatif, aktif, kreatif positif dalam kebhinekaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka (global) dan modern tidak melupakan jati dirinya sebagai masyarakat, bangsa dan negara, harus memiliki rasa tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban serta selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi dengan menjelmakan tanggung jawab sehingga diharapkan akan lahirnya generasi muda "Baru" di masa mendatang.

Dalam keberhasilan pencapaian target perlu adanya keterlibatan guru dan seluruh jajaran sekolah berikut perangkat lembaga lainnya yang ada dengan memulai melatih, membina kelas dan sekolah melalui pola penyampaiannya secara demokratis berikut pelatihan berdemokrasi sehingga kelas dan sekolah harus menjadi lingkungan belajar dengan suasana kondusif untuk mengembangkan nilai, sikap dan perilaku demokratis.

Pendekatan dalam PKn dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji dampak pembelajaran demokrasi yang tercermin melalui pemahaman mereka tentang konsep, komitmen yang terbuka, familiar, toleran, partisipatif, tanggung jawab, kebersamaan, adil dan keterampilan sosial dengan pelaksanaan demokrasi dalam berbagai konteks. Penilaian PKn dilaksanakan

secara nasional. Oleh karena itu guru perlu menyadari dan memiliki komitmen yang terbuka, familiar, partisipatif, inovatif, kebersamaan dan tanggung jawab agar proses pembentukan diri dan budaya hidup siswa dalam lingkungan kehidupannya dilaksanakan .

Proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan berpikir kritis, demokratis, patriotik, etis dan bermoral perlu benar-benar dikembangkan bagi tumbuh berkembangnya kehidupan yang demokratis. Berbagai pendekatan pembelajaran yang dikembangkan perlu dirancang secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan benar dengan didukung oleh sistem evaluasi yang komprehensif, terus menerus, objektif dan konsisten sehingga peran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) dapat mendukung proses pembangunan bangsa dengan sistem politik demokrasi yang stabil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akhirnya akan dicapai.

## **2. Berpikir Kritis**

Berpikir kritis dalam penelitian ini meliputi kegiatan menganalisis ide atau gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. Dalam hal ini pengamatan terhadap proses berpikir kritis diantaranya dilakukan dengan mengamati kreativitas siswa, inovatif siswa, responsibilitas siswa dan improvisasi siswa saat pembelajaran demokrasi berlangsung. Dalam buku tahunan National Council for Social Studies ke 13, yaitu *Teaching critical thinking in social studies*, yang diterjemahkan oleh Anderson dalam (Cornbell,1982:2) :

“ Berpikir kritis telah lama diterima sebagai tujuan pengajaran dalam studi sosial.....dan barangkali lebih tepat dikatakan bahwa para guru studi sosial telah menerima berpikir kritis, tanpa mempedulikan definisi istilah secara tepat atau cukup berbuat banyak saja dengan cara mengajarkan langsung untuk melihat bahwa tujuan itu bisa dicapai “.

Dalam Global Dialog Institut (GDI), *Deep Dialog/Critical Thinking* :

Pedoman Pelatihan Untuk Instruktur (TOT) yang disetujui oleh Depdiknas dan Depag (2001: 13) menjelaskan secara sederhana, berpikir kritis (*Critical-Thinking*) berarti :

1. Membuat diri kita tidak sadar menjadi sadar akan sesuatu hal yang dianggap benar.
2. Menganalisis, membuat pertimbangan yang beralasan tentang apa yang kita anggap benar.
3. Mengenali bahwa kenyataan yang ada adalah merupakan suatu pandangan yang terbentuk berdasarkan pengalaman kita.
4. Menjadi peduli dengan pandangan–pandangan lain yang banyak jumlahnya di dunia ini.
5. Memahami semua pernyataan-pernyataan yang ada dalam konteksnya.
6. Menyesuaikan dengan konteks kita.
7. Membuat setiap pandangan yang ada di dunia selain pandangan kita, merupakan jaringan kerja yang baru.
8. Memberi kritikan terhadap pandangan tersebut secara logis dan beralasan.
9. Mengerti dan menggunakan dengan tepat setiap kata dan ungkapan sehingga pertimbangan dan keputusan yang dibuat diinformasikan dengan jelas dan dapat dilaksanakan.

## **F. Paradigma Penelitian**

### **1. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Program Pendidikan Demokrasi.**

Dalam memahami PKn yang merupakan salah satu mata pelajaran, kita dapat memulainya dari pengkajian terhadap beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia.

Kualifikasi PKn menurut A. Kosasih Djahiri (1996:10) “Bukan saja menuntut manusia Indonesia yang cerdas serta intelektual, berkehidupan modern setara dengan bangsa lain, tetapi dia harus tetap berkepribadian Indonesia dan berjiwa Pancasila. Ini bermakna bahwa *pola pikir, dzikir dan perbuatannya* harus berlandaskan nilai moral dan norma budaya Indonesia dan Pancasila”.

Udin S Winataputra, (2001:21) mengemukakan bahwa konsep Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagai nama suatu bidang kajian ilmiah yang melandasi dan sekaligus menaungi pendidikan kewarganegaraan sebagai program pendidikan demokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Cogan (1994:4) “*Civic Education is the foundation course work in school designed to prepare young citizen for an active role in their communities in their adult live*” . artinya atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Numan Somantri (2001:279) menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik warganegara agar menjadi warganegara yang baik, yakni “Warganegara yang patriotik, toleran, setia

terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis...; Pancasila sejati". Sedangkan pengembangan dari konsep Cogan untuk pengembangan di sekolah agar memiliki pengertian yang lebih luas artinya pengalaman belajar di sekolah seperti di rumah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, melalui media massa dan lain-lain berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warganegara.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan dasar dalam membentuk warga negara yang baik, maka selain mencakup dimensi pengetahuan, karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan lebih menekankan pada dimensi sikap dan keterampilan sosial. Setelah menguasai pengetahuan, selanjutnya seorang warga negara diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai warga negara yang baik, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan dalam bentuk keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta keterampilan menentukan posisi diri, serta kecakapan hidup (*life skills*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah "Mata Pelajaran sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warganegara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa" (Dikbud, 1995:7). Kewarganegaraan yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip Kewarganegaraan. Sedangkan Kewarganegaraan

(*Citizenship*) adalah “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” (Depdiknas; 2002 : 3).

Implikasi dari pandangan tersebut, maka guru hendaknya berperan sebagai fasilitator yang mampu menggali tidak saja kompetensi kognitif siswa tetapi juga kompetensi afektif dan psikomotornya melalui bahan ajar, sumber, media dan lingkungan ajar bahkan melalui kegiatan evaluasinya. A. Kosasih Djahiri (2002:93) menegaskan bahwa keseluruhan proses pembelajaran tersebut akan berjalan mulus manakala semua komponen pengajaran (buku, bahan ajar, media, sumber dan alat evaluasi) serta suasana belajar (*learning climate*) sesuai dengan kemampuan siswa, sarat dengan kebermaknaan (berguna dan bermanfaat), demokratis, ~~dan~~ mengundang, dan mendorong mereka terlibat. Namun perlu diresapi dan disadari para guru, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, guru beserta seluruh jajaran personel sekolah harus mampu menjadi contoh teladan siswanya. Guru membina dan mengembangkan totalitas kepribadian siswa, yakni kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik baik substansial maupun kemahiran potensinya (*learning skill*), dilatih dan diberikan kesempatan untuk pelakonan (*experiencing*) sejumlah sikap perilaku dan budaya hidup yang diharapkan, yang selanjutnya dibawa ke rumah dan lingkungan masyarakat sebagai budaya bakunya sehingga secara tidak langsung menjadi agen penular kebajikan bagi lingkungannya (*sekolah sebagai agent of change*).



## 2. Pengembangan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran

Di beberapa negara maju, sudah lama pendekatan berpikir dijadikan alternatif dalam memecahkan masalah dalam meningkatkan kualitas belajar terutama dalam bidang pembelajaran IPS . Rosenblum (1987) dalam Suwarma (2004 : 13), menyatakan bahwa salah satu tugas sekolah dasar adalah "*.....is to take children how to think* ", selanjutnya ia mengajukan pertanyaan tentang berpikir , kaitannya dengan belajar (*learning*), penalaran (*reasoning*), intuisi (*intuition*), wawasan (*insight*) dan imajinasi (*imagination*). Apakah berpikir itu suatu proses yang berlaku untuk umum, atau hanya untuk orang berbakat saja dan bagaimana peranan guru sebagai pengambil kebijakan belajar.

Menurut Artur (1985) dalam Suwarma Al Muhtar (2004 : 13), bahwa "*kemampuan berpikir dianggap sebagai sumber yang amat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu wawasan guru perlu dikembangkan supaya dapat mengaplikasikan pendidikan berpikir secara produktif* ".

Sedangkan Forbess (1984) dalam Suwarma (2004 : 15), mengidentifikasi tiga kategori yang sangat penting bagi keterampilan berpikir untuk pengembangan kualitas belajar siswa yaitu :

1. *content thinking skill*
2. *Reasoning skill*
3. *Training learning to learn skill*

Pembelajaran berpikir bukan merupakan suatu hal yang tabu dan penting adalah bagaimana meningkatkan kreativitas guru untuk menggunakan model-model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi berpikirnya secara optimal. Melalui pembelajaran secara konseptual dan aplikatif

akan menjadikan suatu harapan dan peningkatan kualitas produk dunia pendidikan yang lebih baik. Pembelajaran berpikir khususnya dalam pembelajaran PKn secara substansial dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melatih daya nalar dan logika siswa dalam menyikapi dan memecahkan masalah berbagai persoalan publik yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dewasa ini. Kemampuan berpikir dapat dikembangkan dan diperkaya dengan memperkaya pengalaman yang bermakna.

Sementara Tyler (1949) dalam Karlimah (1999) berpendapat bahwa:

Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah akan mewujudkan keterampilan berpikir. Oleh karena itu mengajar untuk berpikir kritis berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih penggunaan konsep-konsep dasar untuk berpikir.

Pengalaman ini diperlukan agar siswa memiliki struktur konsep yang berguna dalam menganalisis dan mengevaluasi suatu permasalahan. Berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap individu untuk menyikapi permasalahan kehidupan yang dihadapi.

Mengembangkan keterampilan berpikir kritis sama halnya dengan melatih keterampilan motorik, dimana keduanya memerlukan latihan-latihan. Peranan guru sebagai pendidik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam diri siswa adalah sebagai fasilitator dan motivator. Dalam hal ini guru seyogyanya melatih mereka dengan cara yang ramah dan dapat dimengerti karena penghinaan dan ejekan yang diterima seseorang, akan menghambat produktivitas berpikir kritis orang tersebut. Penner (1995:19). Dengan demikian guru harus menjaga harga diri siswa agar mereka nyaman selama pembelajaran tersebut

berlangsung. Dalam hal ini harus mulai diresapi bahwa sudah seharusnya target sekolah ditambah menjadi: mencapai perolehan nilai akhir (misal UAN) yang tinggi diiringi target keluaran “warga negara yang baik” sebagaimana diuraikan di atas.